

TAJUK RENCANA

Hari-hari Silaturahmi

HARI-HARI belakangan ini, bahkan sampai berakhirnya bulan Syawal, pemberitaan di berbagai media massa (termasuk di SKH Kedaulatan Rakyat), banyak diwarnai silaturahmi, yaitu silaturahmi untuk halal bihalal, syawalan, bermaaf-maafan bahkan juga untuk reuni sesama handai taulan yang sudah lama tidak bersua. Bisa dikatakan, bulan Syawal adalah bulan silaturahmi.

Berbagai macam agenda silaturahmi ini terjadi di hampir semua lini, mulai keluarga dekat usai Salat Idul Fitri atau awal Syawal (termasuk syawalan trah), di berbagai instansi dan perkantoran, di berbagai organisasi dan perkumpulan juga di masyarakat dengan syawalan tingkat RT dan sebagainya. Bahkan rasanya tidak lengkap, atau merasa ada sesuatu yang kurang, kalau di bulan Syawal tidak mengadakan halal bihalal. Tradisi khas Indonesia ini bukan hanya untuk kalangan kaum muslimin saja, tetapi juga diikuti para penganut agama lain, baik di masyarakat maupun di berbagai instansi dan organisasi.

Bahkan di lingkungan pesantren, para kiai setiap hari sibuk menerima silaturahmi masyarakat. Fenomena ini terjadi di seluruh pondok pesantren. Berbagai kelompok masyarakat dari pagi sampai malam tiada henti selalu saja ada yang datang ke kiai, meski tidak kenal secara pribadi. Meski belum tentu punya kesalahannya, tetapi mereka tetap meminta maaf. Lebih dari itu, biasanya mereka juga meminta sang kiai untuk berdoa dan serempak mereka mengamininya. Mereka juga ingin mendapatkan wejangan atau nasihat keagamaan (*mauidzoh hasanah*) dari kiai.

Ini semua bisa dikatakan merupakan salah satu berkah Ramadan dan berkah bulan Syawal. Jadi, yang menikmati keadaan ini bukan hanya orang Islam saja, tetapi semua umat manusia. Sebab di setiap instansi, perkantoran, perusahaan, organisasi non keagamaan, isinya bukan hanya orang Islam saja, tetapi heterogin seseuai kebhinekaan bang-

sa Indonesia. Semua bisa menyatu dalam acara silaturahmi halal bihalal dan syawalan. Mereka semua juga saling meminta maaf, mengaku salah, meski kadang tidak bersalah.

Meski berasal dari idiom Islam, yaitu bahasa Arab, silaturahmi memang berarti luas. Baik untuk diamlakan segenap umat manusia. Silaturahmi atau silaturahmi asalnya dari bahasa Arab yang terdiri dua kata, yaitu *silatun* atau hubungan/pertalian dan *rohim* atau *rohman* yang artinya kasih sayang. Jadi bisa dikatakan silaturahmi atau silaturahmi adalah hubungan kasih sayang sesama manusia. Karena itu alangkah indahnya kalau setiap sesama manusia saling menyayangi. Bukan saling membenci apalagi mencari maki. Kalau hal ini bisa terjadi, mulai dari lingkup masyarakat sampai lingkup berbangsa dan berneka-rasa, maka akan tercipta kehidupan yang ayem, tentrem, harmoni dan penuh toleransi.

Karena itu Idul Fitri dan bulan Syawal yang di Indonesia bertepatan usai pesta demokrasi Pemilu 2024, dijadikan momentum untuk kembali merekatkan tali silaturahmi yang mungkin saat pemilu lalu sudah terkoyak karena perbedaan dukungan atau pilihan politik. Dengan momentum ini, hendaknya bersatu lagi kemudian melangkah bersama-sama untuk memajukan negeri ini melalui tempat pengabdian masing-masing. Tidak ada guna memendam rasa dendam atau kebencian. Semua itu mesti dilebur atau dihilangkan sehingga tidak mengganggu hubungan sosial kemasyarakatan.

Semoga para elite atau tokoh nasional kita juga bisa segera saling bersilaturahmi setelah selama ini bersitegang dengan versi politiknya masing-masing. Jangan mau kalah dengan masyarakat awam, meski mereka tidak bersalahpun mengaku salah dan segera meminta maaf. Dengan momentum silaturahmi syawalan dan halal bihalal, semoga mereka bisa bersatu padu untuk bersama-sama membangun negeri. □-d

Menunggu Putusan MK

SETELAH Pemilu 2024 usai, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyidangkan sengketa pemilihan presiden (Pilpres), kini kita menunggu putusan MK yang paling lambat akan dibacakan pada 22 April nanti. Seperti apa putusannya, kita hanya bisa menebak-nebak.

Yang perlu diketahui, kewenangan MK diatur eksplisit dalam Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ayat (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara Pasal 475. Ayat (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada MK dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (3) Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi. (4) KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Yang menjadi perdebatan utama antara pemohon pasangan calon (Paslon) nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Paslon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pihak Terkait Paslon Nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Raka Buming adalah ayat (2) Pasal 475 UU Pemilu tersebut, yakni tentang 'hanya terhadap hasil perhitungan suara'. Jadi kewenangan mengadili MK hanya pada hasil, bukan proses. Perbedaan dasar antara 'hasil' dan 'proses' inilah yang ramai diperdebatkan selama sidang MK berlangsung pekan lalu.

Adalah seorang *qadli* (hakim) yang sangat terkenal di zaman dulu. Syuraih bin al-Harits al-Kindi, seorang hakim yang tercatat dalam sejarah sebagai seorang hakim yang 'luar biasa' dalam menjalankan tugasnya. Hakim Syuraih ini semakin menjadi fenomenal dalam penegakan hukum karena putusannya terkait sengketa baju besi antara seorang Yahudi dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib (655-660 M). Penyebab fenomenal tersebut karena keberanian dan ketegasan hakim Syuraih dalam memutus perkara tersebut, dia tidak memihak, tidak mau diintervensi penguasa. Awal kisah sengketa baju besi ini setelah Khalifah Ali melihat pembantunya mengenali baju besi tersebut dan yakin bahwa baju besi itu milik Khalifah Ali yang hilang pada perang Shiffin. Khalifah Ali dan orang Yahudi itu sama-sama meng-

Imam Anshori Saleh

klaim baju besi tersebut milik mereka. Akhirnya mereka sepakat menyerahkan perselisihannya kepada Syuraih, seorang hakim yang bijak.

Sebagai *qadli* yang sangat "alim". Syuraih sangat percaya kepada kejujuran Khalifah Ali, juga sangat percaya kepada Hasan bin Ali, cucu Rasulullah. (Khalifah Ali adalah menantu Nabi Muhammad SAW). Tapi Syuraih berprinsip, kebenaran prosedural sesuai hukum acara tetap harus ditegakkan. Saat Syuraih bertanya, Khalifah Ali berkata 'baju besi milik saya yang jatuh dari onta saya saat



KR-JOKO SANTOSO

akan perang Shiffin'. Lalu hakim Syuraih bertanya kepada orang Yahudi 'Wahai Yahudi apa yang akan kamu katakan?' yang dijawab, 'baju besi ini milik saya karena sekarang berada di tangan saya'. Hakim Syuraih kemudian meminta Khalifah Ali mendatangkan dua orang saksi. Khalifah Ali menghadirkan seorang tentara pengawalnya dan anak kandunginya bernama Hasan bin Ali. Hakim Syuraih menilai kesaksian tentara ini dapat diterima, sedang kesaksian Hasan tidak dapat diterima. Sebab Hasan anak kandunginya dan itu dilarang dalam pembuktian.

Andai Syuraih bin Al Haris masih hidup dan menjadi hakim di MK yang mengadili sengketa Pilpres 2024 di Indonesia, maka bisa ditebak dia akan memutus pemenangnya berdasarkan hukum acara yang berlaku di MK dengan menaati undang-undang (UU No. 7 Tahun 2017) beserta bukti-bukti yang ada. Bagi Syuraih dalam penegakan hukum, kebenaran prosedural (hukum acara) harus diutamakan ketimbang kebenaran substantif atau kebenaran materiil.

Kini yang sedang diperdebatkan di luar MK oleh para pihak yang bersengketa di MA

Kenakalan Remaja di Kota Pelajar

KOTA Yogyakarta merupakan salah satu pusat pendidikan dan budaya di Indonesia. Namun, seperti halnya kota-kota lain di dunia, Yogya juga tidak luput dari masalah kenakalan remaja yang menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah setempat.

Kenakalan remaja merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai faktor, termasuk lingkungan sosial, keluarga, pendidikan, dan perkembangan individu. Di Yogya, beberapa bentuk kenakalan remaja yang sering terjadi antara lain perilaku merokok, konsumsi miras, pergaulan bebas, tawuran antar remaja, dan penyalahgunaan narkoba.

Salah satu faktor yang dapat memicu kenakalan remaja adalah perkembangan teknologi dan media sosial. Kemajuan teknologi membuka akses remaja terhadap informasi, namun juga memperkenalkan mereka pada berbagai konten negatif dan perilaku tidak sehat. Selain itu, tekanan akademik, kurangnya pengawasan dari orangtua, serta kurangnya kesadaran akan dampak negatif dari perilaku kenakalan remaja juga turut berperan dalam meningkatnya kasus kenakalan remaja.

Selain itu, lingkungan pergaulan juga turut memengaruhi perkembangan identitas remaja. Remaja cenderung terpengaruh oleh lingkungan sekitar, dan jika lingkungan tersebut tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan positif, hal ini

Tiana Dwi Astuti

dapat memperburuk masalah kenakalan remaja. Dampak dari kenakalan remaja juga dapat dirasakan secara fisik maupun mental, seperti kecanduan narkoba hingga kepribadian yang menyimpang, yang pada akhirnya dapat membahayakan diri sendiri, keluarga, atau bahkan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah kenakalan remaja, berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat, perlu bekerja sama dalam memberikan solusi yang holistik. Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan adalah peningkatan peran orangtua dalam mengawasi dan mendampingi anak-anak mereka. Orangtua perlu memberikan pemahaman yang kuat mengenai nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab kepada anak-anak mereka. Selain itu, lembaga pendidikan juga dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman tentang bahaya kenakalan remaja dan mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam kurikulum pendidikan. Program-program ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan bakat dan minat remaja juga dapat menjadi sarana untuk mengalihkan energi mereka ke hal-hal yang positif.

Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan

dan para ahli adalah apakah MK akan memutus sengketa antara Paslon nomor 1 Anis-Muhaimin, Paslon nomor 3 Ganjar-Mahfud), Pihak KPU dan Pihak Terkait (Paslon nomor 3 Prabowo-Gibran) dengan memberikan keadilan prosedural atau keadilan substantif? Kalau acuannya aliran Hakim Syuraih, maka yang diutamakan adalah keadilan prosedural berdasarkan hukum acara dengan bukti-bukti yang ada. Dasarnya ya UU Pemilu 2017 yang masih berlaku. Tapi para pembela paslon 1 dan paslon 3 menghendaki MK mengabaikan ketentuan yang ada. Mereka menginginkan MK tidak sekadar mengadili angka, MK bukan 'Mahkamah Kalkulator'. Mereka mengaitkan kemenangan Prabowo-Gibran karena 'cawe-cawe' Presiden Joko Widodo — yang anaknya menjadi calon Wakil Presiden — dengan menggelontorkan bansos dan pengerahan aparat pemerintah pada masa kampanye.

Idealnya keadilan substantif dan keadilan prosedural harus berjalan paralel. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan negara, yang mempunyai otoritas untuk menegakkan hukum materiil, yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum prosedural tertentu. Tanpa hukum prosedural (antara lain, siapa yang berwenang dan bagaimana cara melaksanakannya, apa batas-batasnya) maka negara tidak ada artinya.

Di sinilah hakim MK diuji apakah mereka tetap menggali kebenaran materiil dengan mengabaikan hukum acara demi memberikan keadilan substantif atau tetap berpegang pada ketentuan undang-undang. Kita percaya MK akan memutus berdasarkan pertimbangan tujuan hukum: yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan MK adalah final and binding, terakhir dan mengikat. Begitu MK memutus, para pihak puas atau tidak puas, maka putusan itulah yang akan menjadi dasar KPU untuk menetapkan paslon mana yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Tidak ada lagi upaya hukum lain. Jika ada wacana pengajuan angket di DPR, tidak ada kaitan dengan sah atau tidaknya Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2023. □

*) **Dr. Imam Anshori Saleh SH, MH,** Anggota DPR-RI (2004-2009), Wakil Ketua Komisi Yudisial RI (2010-2015)

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

narkoba, memperkuat regulasi terkait penjualan miras kepada remaja, dan memberikan edukasi mengenai bahaya tawuran antar remaja.

Dengan kerjasama yang kuat antara berbagai pihak terkait, diharapkan masalah kenakalan remaja dapat diminimalkan. Pembinaan generasi muda yang berlandaskan pada nilai-nilai moral, kepedulian, dan pendidikan yang berkualitas akan menjadi kunci dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Yogya dan Indonesia pada umumnya. □-d

*) **Tiana Dwi Astuti**, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia-S1 UNY.

Pojok KR

Waspadai bencana hodrometeorologi!
-- Kita semua memang tidak boleh lengah.

Satpol PP tertibkan sampah visual.
-- Setelah ini jangan dikotori lagi.

Waspadi kenaikan harga pangan dan inflasi.
-- Tugas pemerintah untuk terus menstabilkan.

Berabe

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Aspal Mengelupas

JALAN Semanu-Giripang-gung kilometer 2 aspalnya sudah mengelupas, tepatnya mulai depan Kapel Santo Yusuf Semanu, Semanu Selatan Gunungkidul sampai Padukuhan Tambak. Spiltsnya sudah kelihatan sehingga kalau berkendara menimbulkan bunyi gludhuk-gludhuk. Selain itu, ada juga yang berlubang sehingga pengendara yang belum paham akan melindasnya begitu saja dan menimbulkan bunyi dhok. Shoknya bisa rusak, velk

bengkok atau ban yang tidak penuh anginnya bisa bocor. Jalannya memang lurus sehingga pengendara lebih senang mengebut. Mengingat Lebaran sebentar lagi, saudara-saudara banyak yang akan pulang kampung atau ketika Lebaran banyak yang melintas, kiranya instansi yang terkait dapat meninjau dan mengambil tindakan demi kelancaran dan keselamatan penggunaan jalan. □-d
*) **Wiyana**, Semanu Selatan RT 007/RW 042 Gunungkidul

Kedaulatan Rakyat
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerbit: Drs H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Ishaq Zubedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lamparsari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.